

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan juga pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara sengaja dan terencana untuk mencapai situasi yang sendinya terdapat proses perencanaan (Rustiadi, *et.al*, 2009). Terjadinya perubahan baik secara *incremental* maupun paradigma, mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan (Anwar, 2001). Namun, pengembangan/pembangunan wilayah yang tidak merata akan menyebabkan disparitas atau kesenjangan. Adanya *heterogenitas* dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor suatu daerah.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa dan mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam, dari pegunungan hingga kelautan. Tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi membagi wilayah ini dengan empat *cluster* yaitu Banyuwangi Utara, Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Tengah Timur dan Banyuwangi Tengah Barat. Namun permasalahan yang paling mencolok berada pada wilayah utara dan selatan. Hal ini dikarenakan untuk Banyuwangi Tengah Barat telah berkembang seperti Kecamatan Genteng sebagai pusat pertumbuhan terbesar ke-2 di Kabupaten Banyuwangi, dan Banyuwangi Tengah Timur yang berkembang dengan adanya bandara di Rogojampi dan pusat perikanan di Muncar. Namun untuk Banyuwangi Selatan masih kurang perhatian sehingga mengakibatkan wilayah ini kurang berkembang. Selain belum lengkapnya aksesibilitas berupa jalan utama. Jalan arteri yang ada hanya melewati wilayah tengah hingga utara yang terhubung dengan jalan pantura. Sedangkan untuk wilayah selatan rencananya akan dibangun Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kalibaru.

Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 disebutkan bahwa kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Banyuwangi tergolong masih belum memadai

bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Permasalahan ini dapat dilihat antara lain hingga tahun 2012 wilayah utara tidak memiliki terminal, sedangkan wilayah utara memiliki 3 terminal. Kepadatan penduduk antar dua wilayah ini lebih tinggi pada wilayah utara yaitu kepadatan tinggi berada di Kecamatan Banyuwangi sebesar 3.538 jiwa/km², sedangkan wilayah selatan memiliki kepadatan rendah yaitu rata-rata hanya 267,4 jiwa/km². PDRB di wilayah utara jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah selatan. Di wilayah utara memiliki PDRB sebesar 7.240.674,13 juta rupiah sedangkan di wilayah selatan hanya 4.916.485,92 juta rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai disparitas antara wilayah utara dan wilayah selatan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui kesenjangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Identifikasi Masalah

1. PDRB di wilayah utara jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah selatan. Di wilayah utara memiliki PDRB sebesar 7.240.674,13 juta rupiah sedangkan di wilayah selatan hanya 4.916.485,92 juta rupiah. Ibukota wilayah Banyuwangi Utara adalah Kota Banyuwangi dengan fungsi sebagai pusat pelayanan skala kabupaten. Sedangkan ibukota wilayah Banyuwangi selatan adalah Kota Bangorejo yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kecamatan.
2. Banyuwangi Utara, Banyuwangi Tengah Timur, dan Banyuwangi Tengah Barat memiliki dinamika perkembangan ekonomi dan infrastruktur lebih baik. Sementara itu ada wilayah lain yang memiliki kelambatan di dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur seperti di wilayah Banyuwangi Selatan.
3. Tahun 2012 kepadatan penduduk di wilayah selatan hanya sebesar 1.377 jiwa/km² mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk bertempat tinggal di wilayah utara karena ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pola perkembangan wilayah, PDRB dan fasilitas penunjang wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan?

2. Bagaimana tingkat disparitas wilayah Banyuwangi Selatan dan Banyuwangi Utara?

1.4 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji pola perkembangan wilayah, PDRB dan fasilitas penunjang wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan.
2. Untuk mengetahui tingkat disparitas wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan.

1.5 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian guna mengetahui dan mengkaji disparitas wilayah Banyuwangi Selatan dan Banyuwangi Utara di Kabupaten Banyuwangi.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

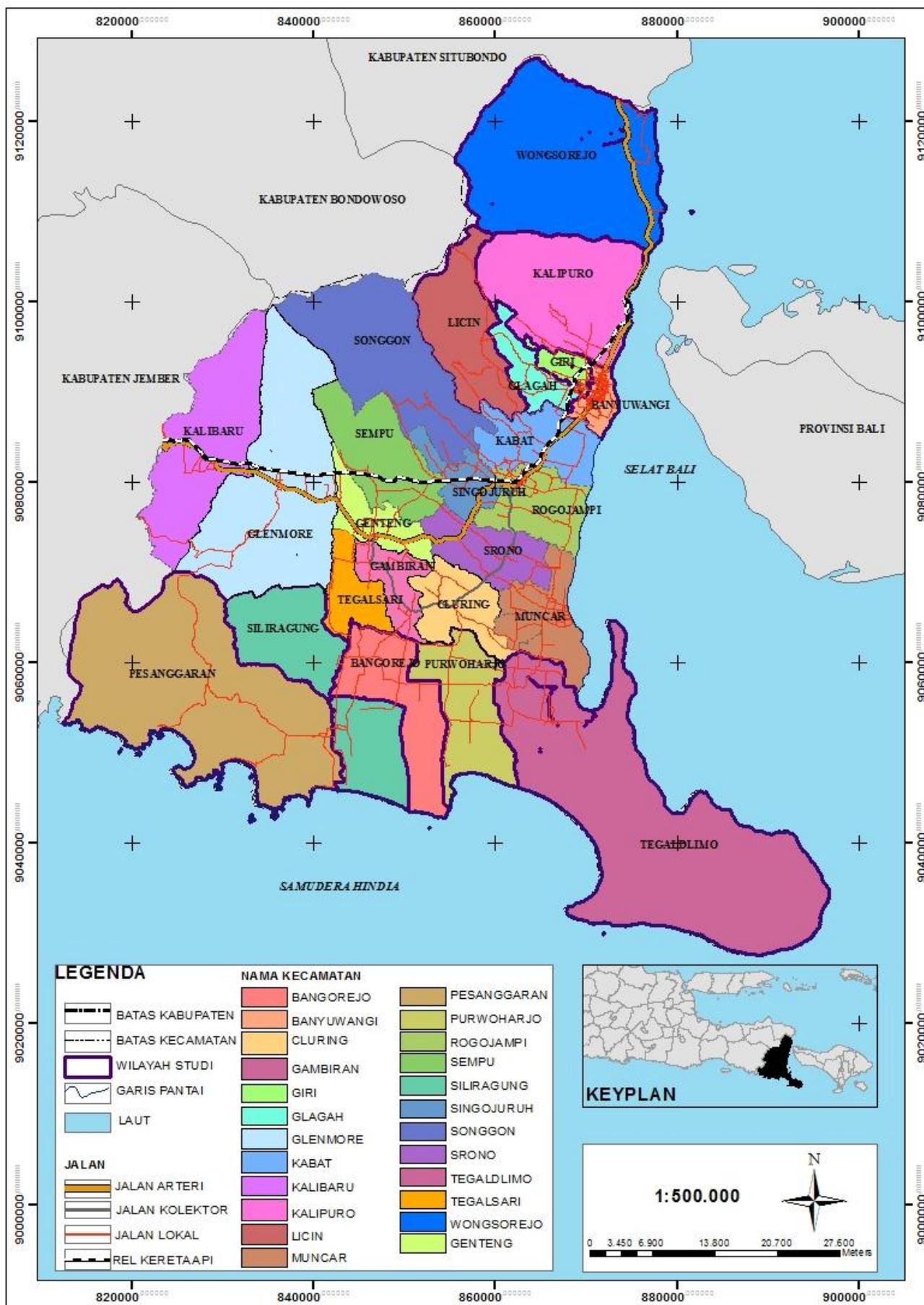
Berikut adalah ruang lingkup penelitian, yang terdiri atas ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup materi.

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan. Dengan wilayah sebagai berikut:

1. Banyuwangi Utara: Kecamatan Kota Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Giri, Kecamatan Licin dan Kecamatan Glagah.
2. Banyuwangi Selatan: Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Pesanggaran, dan Kecamatan Tegaldlimo.

Dalam menentukan wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi selatan mengacu kepada RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2031 dan pada karakteristik wilayah.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

1. Mengkaji perkembangan wilayah, PDRB dan fasilitas penunjang wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan
 - a. Karakteristik wilayah dilihat melalui geografis dan demografis
 - b. PDRB yang dimaksud adalah PDRB Kecamatan dan PDRB Perkapita Kecamatan di wilayah Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan.
 - c. Fasilitas penunjang dilihat berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, panjang jalan, jenis jalan, jumlah terminal, dan jumlah angkutan umum.
2. Mengetahui tingkat disparitas wilayah di Banyuwangi Utara dan Banyuwangi selatan. Variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, jumlah sarana perdagangan, jumlah sarana kesehatan, panjang jalan, jumlah terminal, jumlah angkutan umum/bis, dan PDRB.
 - a. Analisis ekonomi menggunakan Indeks Williamson dengan variabel data PDRB.
 - b. Analisis sarana prasarana menggunakan indeks skalogram dan sentralitas dengan variabel jumlah penduduk, jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, terminal, dan angkutan umum.
 - c. Evaluasi kebijakan dengan kesenjangan pembangunan menggunakan analisis kebijakan dengan data RTRW Kabupaten Banyuwangi.
 - d. Tingkat perkembangan Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan menggunakan Indeks Perkembangan Wilayah dengan variabel jumlah penduduk, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah sarana pendidikan. Hal ini dikarenakan data mengenai perdagangan dan transportasi tidak tersedia secara series.
 - e. Penentuan faktor paling mempengaruhi disparitas wilayah menggunakan AHP dan skoring AHP dengan variabel jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, jumlah sarana perdagangan, jumlah sarana kesehatan, panjang jalan, jumlah terminal, jumlah angkutan umum/bis, dan PDRB
 - f. Tingkat disparitas wilayah menggunakan analisis skoring gabungan terhadap analisis sebelumnya, yaitu indeks williamson, indeks skalogram dan sentralitas, serta AHP.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, sistematika pembahasan serta kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dari penyusunan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang digunakan serta berisi teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan di bahas, teori-teori antara lain pengertian wilayah, pengertian pengembangan wilayah, pengertian disparitas wilayah, pengertian ekonomi wilayah, pengertian sarana dan prasarana wilayah, pengertian wilayah belakang, faktor pendorong kemajuan wilayah serta metode yang digunakan dalam kajian disparitas wilayah terhadap Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Selatan, Kabupaten Banyuwangi.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang uraian metode dalam penyusunan laporan mulai dari pengumpulan data dan metode termasuk di dalamnya diagram alir penelitian dan desain survei.

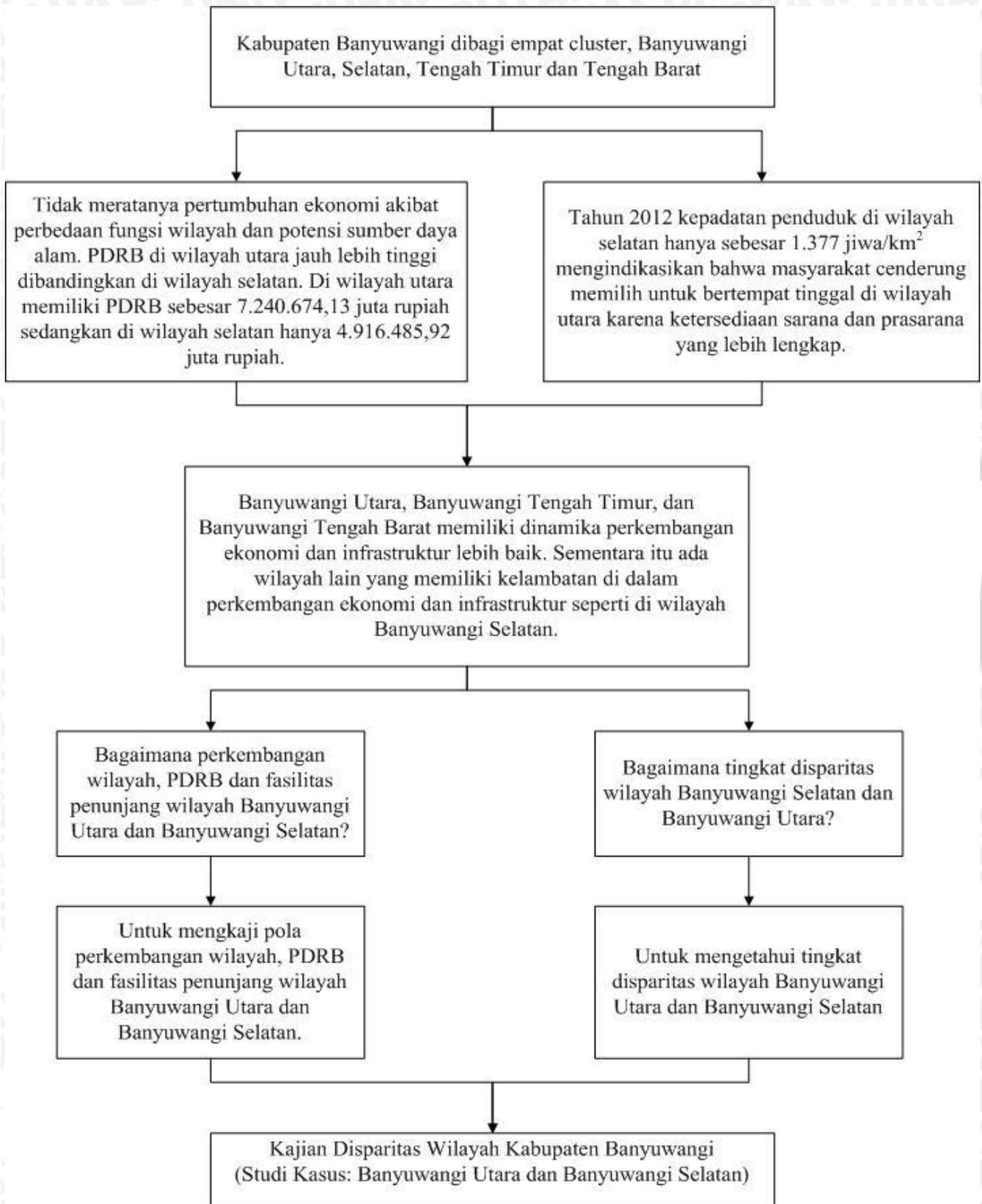
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pengolahan data yang dianalisis seperti gambaran umum wilayah studi dan tingkat kesenjangan wilayah studi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi mengenai kesimpulan yang di dapat dalam melakukan penelitian dan disertai dengan saran-saran penggunaan hasil penelitian ini bagi instansi pemerintah juga saran-saran untuk penelitian selanjutnya

1.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran